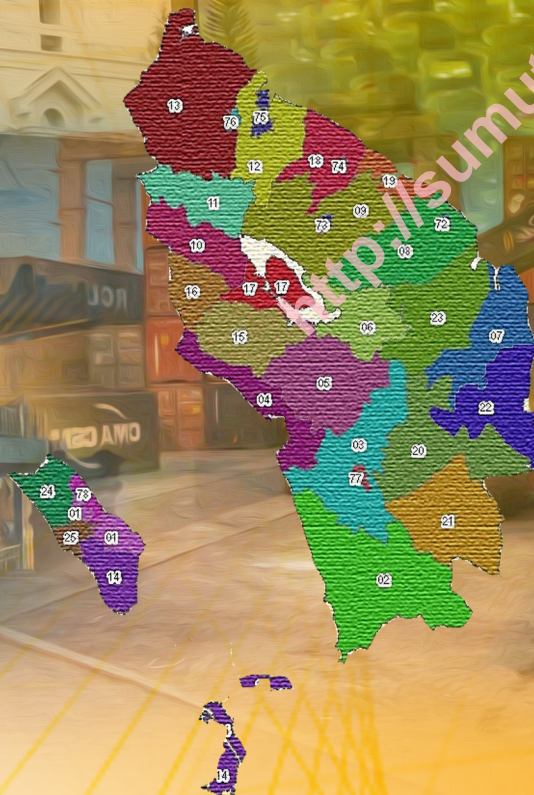


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN PROVINSI SUMATERA UTARA

2010-2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN PROVINSI SUMATERA UTARA

2010-2014



PDRB Menurut Pengeluaran (Tahun Dasar 2010) Provinsi Sumatera Utara, 2010-2014

No. ISSN : 2356-122x
No. Publikasi : 12550.1502
Katalog BPS : 9302002.12
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 96 halaman

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggung jawab Umum : Ir. Wien Kusdiatmono, MM
- Penanggung jawab Teknis : Ateng Hartono, S.E, M.Si
- Editor : Ir. Masta Juwita Gurning, MM
- Penulis : Sri Juliana Siburian, S.Si, M.Si

Gambar Kulit : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Medan, Juli 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara

Ir. Wien Kusdiatmono, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Pendapatan Regional	3
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	5
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori	24
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	28
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN SUMATERA UTARA 2010-2014	31
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran ..	34
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	39
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	44
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	45
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	49
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	52
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	54
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	56
3.9 Perkembangan Net Ekspor antar daerah	59

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN SUMATERA UTARA 2010-2014	61
4.1	PDRB (Nominal)	63
4.2	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	65
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	66
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	67
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	68
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	69
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	70
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	72
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	74
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	75
	PENUTUP	77
	LAMPIRAN	81
	DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010-2014 ..	34
Tabel 3.2. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010-2014	35
Tabel 3.3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 – 2014	36
Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 – 2014	37
Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010 – 2014	38
Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Sumatera Utara, 2010 – 2014	39
Tabel 3.7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Sumatera Utara, 2010 – 2014	41
Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Sumatera Utara, 2010 – 2014	42
Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Sumatera Utara, 2010 – 2014	43
Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Sumatera Utara, 2010 – 2014	44
Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Sumatera Utara, 2010 – 2014	45
Tabel 3.12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Sumatera Utara, 2010 – 2014	47
Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur PMTB Sumatera Utara, 2010 – 2014.....	50
Tabel 3.14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Sumatera Utara, 2010 – 2014	53
Tabel 3.15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Sumatera Utara, 2010 – 2014	54

Tabel 3.16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Sumatera Utara, 2010 – 2014	57
Tabel 4.1	PDRB dan PDRB Perkapita Sumatera Utara, 2010–2014	64
Tabel 4.2	Perbandingan PDRB Sumatera Utara Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor 2010–2014 ...	65
Tabel 4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Sumatera Utara 2010–2014	66
Tabel 4.4	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Sumatera Utara, 2010–2014	67
Tabel 4.5	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Sumatera Utara 2010–2014	68
Tabel 4.6	Rasio PDRB terhadap Impor Sumatera Utara 2010–2014	69
Tabel 4.7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Sumatera Utara, 2010–2014	70
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Sumatera Utara 2010–2014	72
Tabel 4.9	Rasio Perdagangan Internasional, Sumatera Utara, 2010 – 2014..	74
Tabel 4.10	Incremental Capital Output Ratio, Sumatera Utara, 2010 – 2014...	75

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 - 2014	34
Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB Sumatera Utara, 2010 - 2014	51
Grafik 3.3. Perbandingan Perubahan Inventori ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara, 2010 - 2014	53
Grafik 3.4. Perkembangan Impor Barang dan Jasa ADHB Sumatera Utara, 2010 - 2014	58

<http://sumut.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 - 2014	83
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 - 2014	84
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 - 2014	85
Lampiran 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010-2014	86
Lampiran 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 - 2014	87
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 - 2014	88
Lampiran 7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 - 2014	89
Lampiran 8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 - 2014.....	90
Lampiran 9	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010-2014..	91
Lampiran 10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 - 2014	92

BAB I

PENDAHULUAN

<http://sumut.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Pengalihan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II
METODE ESTIMASI DAN
SUMBER DATA

<http://sumut.bps.go.id>

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = $\frac{\text{pengeluaran konsumsi perkapita seminggu} \times (30/7) \times 12 \times \text{jumlah penduduk pertengahan tahun}}$
 - b. Bukan makanan = $\frac{\text{pengeluaran konsumsi perkapita sebulan} \times 12 \times \text{jumlah penduduk pertengahan tahun}}$
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) merupakan bagian dari pengeluaran lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan

atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb.

Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PK-P Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar - penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi ADHK

PK-P ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari PDRB komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun

barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
 - i. Publikasi Statistik Konstruksi.
 - j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHB 2010, maka PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi

menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK 2010.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADHK 2010 dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK 2010 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK 2010 tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK 2010 di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB ADHK 2010 adalah dengan cara men-“deflate” PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan

data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan cara mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan

pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjenak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama

adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori ADHK 2010, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK 2010 dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Import Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Import barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-import jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-import tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN

SUMATERA UTARA

BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN

SUMATERA UTARA, 2010 - 2014

<http://sumut.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Sumatera Utara akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 s.d 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sumatera Utara digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB SUMATERA UTARA MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Sumatera Utara menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 3.1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara, 2010-2014

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	178 332,31	198 151,46	222 744,92	254 148,64	286 960,38
2. Konsumsi LNPRT	3 839,64	4 020,89	4 261,58	4 675,82	5 128,86
3. Konsumsi Pemerintah	25 707,62	29 568,52	33 386,62	37 063,22	40 798,56
4. PMTB	99 539,60	113 110,11	131 490,57	149 487,47	166 612,99
5. Perubahan Inventori	12 292,13	4 026,24	7 219,29	7 132,87	5 829,92
6. Ekspor	133 920,44	161 949,43	168 825,71	179 651,08	188 901,78
7. Impor	122 546,50	133 789,52	150 808,25	161 937,13	170 460,92
Total PDRB	331 085,24	377 037,10	417 120,44	470 221,98	523 771,57

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.1, nilai PDRB Sumatera Utara Indonesia ADHB selama periode tahun 2010 s.d 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK 2010, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen

pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010-2014

(Miliar Rp)

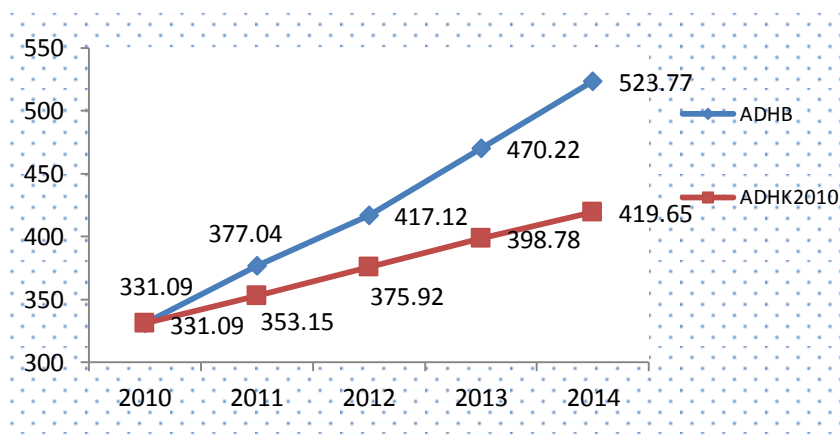
Komponen Pengeluaran (1)	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013 ^{*)} (5)	2014 ^{*)} (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	178 332,31	186 197,96	195 133,16	204 962,97	215 885,14
2. Konsumsi LNPRT	3 839,64	3 987,87	4 125,83	4 329,80	4 533,95
3. Konsumsi Pemerintah	25 707,62	26 899,31	28 317,90	29 453,58	30 308,08
4. PMTB	99 539,60	105 474,68	114 503,16	120 478,95	124 187,91
5. Perubahan Inventori	12 292,13	4 763,22	7 095,22	6 477,27	9 765,86
6. Ekspor	133 920,44	168 211,09	188 447,53	179 430,98	186 415,92
7. Impor	122 546,50	142 386,54	161 698,66	146 354,29	151 447,58
Total PDRB	331 085,24	353 147,59	375 924,14	398 779,25	419 649,28

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Sumatera Utara berdasarkan PDRB ADHK 2010 dapat dilihat pada tabel 3.2. Sama halnya dengan PDRB ADHB, Nilai PDRB ADHK 2010 juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 3.1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara, 2010 - 2014



Dari grafik 3.1, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK 2010. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT(PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3.3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara
2010 – 2014**

Komponen Pengeluaran (1)	(persen)				
	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013*) (5)	2014*) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	53,86	52,55	53,40	54,05	54,79
2. Konsumsi LNPRT	1,16	1,07	1,02	0,99	0,98
3. Konsumsi Pemerintah	7,76	7,84	8,00	7,88	7,79
4. PMTB	30,06	30,00	31,52	31,79	31,81
5. Perubahan Inventori	3,71	1,07	1,73	1,52	1,11
6. Ekspor	40,45	42,95	40,47	38,21	36,07
7. Impor	37,01	35,48	36,15	34,44	32,54
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2010 – 2014, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga sekitar 52-55 persen,. Ekspor juga mempunyai peran yang besar, karena sekitar 36 s.d 43 persen produk Provinsi Sumatera Utara mampu menembus pasar internasional dan antar daerah.

Demikian juga dengan impor, karena sekitar 32 s.d 37 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 30

s.d 32 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 7 hingga 8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2010-2014 perdagangan internasional Provinsi Sumatera Utara yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung sedikit lebih tinggi dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan internasional Sumatera Utara dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi surplus atau menguntungkan.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 s.d 2014 mengalami fluktuasi. Seperti yang tertera di tabel 3.4. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 6,66 persen, sebaliknya terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 5,23 persen.

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Sumatera Utara 2010 – 2014

Komponen Pengeluaran (1)	(persen)				
	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013*) (5)	2014*) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,55	4,41	4,80	5,04	5,33
2. Konsumsi LNPRT	4,91	3,86	3,46	4,94	4,72
3. Konsumsi Pemerintah	1,83	4,64	5,27	4,01	2,90
4. PMTB	3,89	5,96	8,56	5,22	3,08
5. Perubahan Inventori	259,33	(61,25)	48,96	(8,71)	50,77
6. Ekspor	0,98	25,61	12,03	(4,78)	3,89
7. Impor	2,03	16,19	13,56	(9,49)	3,48
Total PDRB	6,38	6,66	6,45	6,08	5,23

*) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010 - 2014

Komponen Pengeluaran (1)	(persen)				
	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013*) (5)	2014*) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	106,42	114,15	124,00	132,92
2. Konsumsi LNPRT	100,00	100,83	103,29	107,99	113,12
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	109,92	117,90	125,84	134,61
4. PMTB	100,00	107,24	114,84	124,08	134,16
5. Perubahan Inventori	100,00	84,53	101,75	110,12	59,70
6. Ekspor	100,00	96,28	89,59	100,12	101,33
7. Impor	100,00	93,96	93,27	110,65	112,55
Total PDRB	100,00	106,76	110,96	117,92	124,81

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

¹ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Sumatera Utara, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	178 332,31	198 151,44	222 744,92	254 148,64	286 960,38
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	178 332,31	186 197,96	195 133,16	204 962,97	215 885,14
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	53,86	52,55	53,40	54,05	54,79
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB 2010	58 498,11	64 056,84	71 004,22	79 932,37	89 097,21
b. ADHK 2010	58 498,11	60 192,61	62 202,44	64 462,97	67 029,34
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB 2010	13 687,69	14 987,70	16 612,59	18 700,81	20 844,30
b. ADHK 2010	13 687,69	14 083,57	14 553,27	15 081,62	15 681,52
Pertumbuhan²					
a. Total konsumsi RT	4,55	4,41	4,80	5,04	5,33
b. Per-RT	-	2,90	3,34	3,63	3,98
c. Perkapita	-	2,89	3,34	3,63	3,98
Jumlah RT (unit)	3 048 514	3 093 369	3 137 066	3 179 546	3 220 756
Jumlah penduduk (000 org)	13 029	13 221	13 408	13 590	13 767

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.6, tercermin bahwa dalam kurun waktu 2010 - 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK 2010), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d 2014 cukup berfluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 54,79 persen dan terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu 52,55 persen.

Pasca krisis ekonomi tahun 1998/1999 atau masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya. Peningkatan penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor), juga turut menjadi pendorong meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2010, secara umum setiap rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara menghabiskan dana sekitar 58.498,11 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 64.056,84 ribu rupiah (2011); 71.004,22 ribu rupiah (2012); 79.932,37 ribu rupiah (2013); dan menjadi 89.097,21 ribu rupiah (2014).

Sementara itu, berdasarkan PDRB ADHK 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga selama periode 2011 s.d 2014 tumbuh pada kisaran 2 - 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,98 persen. Pada sisi lain, rata-rata pertumbuhan konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Sumatera Utara meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara "riil" berkisar antara 2 s.d 3 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK 2010 sebesar 4,55 persen pada tahun 2010. Kemudian, mengalami perlambatan pada tahun 2011 sebesar 4,41 persen. Selanjutnya konsumsi rumah tangga tumbuh stabil hingga tahun 2014 sebesar 5,33 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 3.7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Sumatera Utara, 2010 – 2014³

(persen)

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013 [*]	2014 [*]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	43,22	42,24	41,37	40,97	40,58
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,41	4,32	4,10	4,22	4,33
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,04	14,14	14,00	14,17	14,62
d. Kesehatan & Pendidikan	7,03	7,04	7,04	6,98	7,05
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	20,42	20,99	21,86	22,01	21,52
f. Hotel dan Restoran	7,84	8,05	8,50	8,49	8,65
g. Lainnya	3,05	3,23	3,13	3,16	3,26
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*}) Angka Sementara

^{**}) Angka Sangat Sementara

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, kontribusi konsumsi bukan makanan terhadap total konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan selama periode tersebut cenderung berada pada kisaran yang sedikit menurun, yaitu 43,22 persen (2010) ; 42,24 persen (2011) ; 41,37 persen (2012) ; 40,97 persen (2013) ; dan 40,58 persen (2014).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi

³Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Sumatera Utara, 2010 – 2014

(persen)

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,30	2,56	4,11	4,76	5,34
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,64	4,32	5,85	5,39	5,03
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,33	4,35	5,01	4,29	4,65
d. Kesehatan & Pendidikan	4,94	7,07	5,31	4,76	5,23
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3,68	7,04	5,09	5,30	5,50
f. Hotel dan Restoran	8,01	3,24	6,49	7,46	6,39
g. Lainnya	2,51	10,39	4,36	4,53	4,93

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 mengalami perlambatan hingga sebesar 2,56 persen, sedangkan tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan hingga 5,34 persen. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Pada 2010 laju pertumbuhan yang dominan pada sub kelompok hotel dan restoran; diikuti dengan pakaian dan alas kaki yaitu 8,01 persen dan 6,64 persen. Tahun berikutnya 2011, laju pertumbuhan didominasi oleh konsumsi lainnya tumbuh sebesar 10,39. Tahun 2012 hingga 2014, laju pertumbuhan hotel dan restoran kembali mendominasi konsumsi rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran
Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Sumatera Utara, 2010 – 2014⁴**

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,97	5,89	5,75	7,88	6,15
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,60	4,38	0,73	11,44	10,26
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,04	7,22	6,02	10,72	11,27
d. Kesehatan & Pendidikan	7,84	3,92	6,82	7,89	8,41
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	7,04	6,71	11,40	9,11	4,66
f. Hotel dan Restoran	3,48	10,59	11,39	6,14	8,06
g. Lainnya	5,12	6,43	4,60	10,02	11,04

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 3.9, menunjukkan secara umum peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga pada kelompok makanan mulai terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,88 persen, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 sebesar 6,15 persen.

⁴Tingkat perubahan harga produk konsumsi

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Tabel 3.10 menunjukkan proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB yang kecil.

Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Sumatera Utara, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	3 839,64	4 020,89	4 261,58	4 675,82	5 128,86
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	3 839,64	3 987,87	4 125,83	4 329,80	4 533,95
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,16	1,07	1,02	0,99	0,98
Pertumbuhan	4,91	3,86	3,46	4,94	4,72

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.10, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi LNPRT pada periode 2010-2014 mengalami peningkatan. Namun proporsi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Proporsi yang tertinggi terjadi pada 2010 sebesar 1,16, mengalami penurunan hingga 0,98 persen pada tahun 2014. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi pertumbuhan konsumsi LNPRT adalah pemilihan gubernur dan kepala daerah.

Bila dilihat dari pendapatan riil, maka konsumsi LNPRT ADHK pada tahun 2010 sebesar 3.839,64 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 4,91 persen dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2012, konsumsi LNPRT mengalami perlambatan hingga 3,46 persen atau sebesar 4.125,83 miliar rupiah. Pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen, kemudian mengalami perlambatan menjadi 4,72 persen atau sebesar 4.533,95 miliar rupiah.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Sumatera Utara serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Sumatera Utara, 2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	25 707,62	29 568,52	33 386,62	37 063,22	40 798,56
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	25 707,62	26 899,31	28 317,90	29 453,58	30 308,08
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	7,76	7,84	8,00	7,88	7,79
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	1 973,16	2 236,49	2 490,01	2 727,19	2 963,54
b. ADHK 2010	1 973,16	2 034,60	2 111,98	2 167,26	2 201,53
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	99 822,24	116 962,69	134 719,08	152 887,81	164 546,15
b. ADHK 2010	99 822,24	106 404,25	114 266,19	121 497,62	122 236,62
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	1,83	4,64	5,27	4,01	2,90
b. Konsumsi perkapita	-	3,11	3,80	2,62	1,58
c. Konsumsi per-pegawai	-	6,59	7,39	6,33	0,61
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶	257 534	252 803	247 824	242 421	247 946
Jumlah penduduk (000 org)	13 029	13 221	13 408	13 590	13 767

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 25.707,62 miliar rupiah,

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya mencapai 40.798,56 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Kontribusi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2010; sedangkan tertinggi pada tahun 2012 yang mencapai 8,00 persen. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-kapita ADHB sebesar 1.973,16 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini terlihat di tabel 3.11.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita ADHK 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut mengidentifikasi adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 99.822,24 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik ADHB maupun ADHK 2010). Lain halnya dengan jumlah pegawai pemerintah mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 257.534 orang, mengalami penurunan hingga tahun 2014 sebanyak 247.946. Dalam kurun waktu 2010 - 2014, secara total terjadi pengurangan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 9.588 orang atau turun sebesar 3,70 persen dari tahun 2010.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan seberapa besar pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber

daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 5,27 persen; untuk konsumsi per-kapita 3,80 persen; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,39 persen.

Tabel 3.12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Sumatera Utara, 2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah ⁷					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp.)	14 528,36	16 268,29	18 771,52	20 966,37	23 180,88
(%)	56,51	55,02	56,22	56,57	56,82
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp.)	11 179,25	13 300,23	14 615,10	16 096,85	17 617,68
(%)	43,49	44,98	43,78	43,43	43,18
Total Konsumsi (Miliar Rp.)	25 707,62	29 568,52	33 386,62	37 063,22	40 798,56
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	2,6	3,69	6,64	4,01	3,3
b. Konsumsi Individu	0,86	5,87	3,53	4,40	2,38
Total Konsumsi	1,83	4,64	5,27	3,5	2,90
Pertumbuhan indeks harga implisit ⁸ (%)					
a. Konsumsi Kolektif	4,56	8,00	8,20	6,98	7,03
b. Konsumsi Individu	4,22	12,38	6,13	6,42	6,91
Total Konsumsi	4,41	9,92	7,26	6,73	6,97

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Sekitar 55 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang terdapat dalam tabel 3.12. Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami

⁷Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁸Tingkat perubahan harga produk konsumsi

fluktuasi. Pada tahun 2010 proporsinya mencapai 56,51 persen dan pada tahun 2011 turun menjadi 55,02 persen. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 56,22 persen dan meningkat kembali di tahun 2013 menjadi 56,57 persen, hingga pada tahun 2014 menjadi 56,82 persen.

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ketahun, proporsi konsumsi individu pada periode 2012-2014 cenderung menurun. Pada tahun 2010 nilai konsumsi individu sebesar 11.179,25 miliar rupiah atau sebesar 43,49 persen peranannya terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2014 proporsinya menurun menjadi 43,18 persen atau sebesar 17.617,68 miliar rupiah.

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan sebesar 257.534 orang (2010) menjadi 210.663 orang (2014). Hal ini tidak sejalan dengan jumlah penduduk yang meningkat dari sejumlah 13.029 ribu orang pada tahun 2010 menjadi 13.767 ribu orang pada tahun 2014. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung mengalami peningkatan dengan masing-masing adalah 50,59 (2010), 52,30 (2011), 54,10 (2012), 56,06 (2013), dan 55,52 (2014). Hal ini berarti pada tahun 2010 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 51 penduduk, dan maka pada tahun 2014 menjadi sekitar 56 penduduk.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Selain itu dapat juga diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.13 menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai besaran angka 8,56 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu hanya sebesar 3,08 persen.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung menurun tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen non bangunan.

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Sumatera Utara, 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	99 539,60	113 110,11	131 490,57	149 487,47	166 612,99
b. ADHK (Miliar Rp)	99 539,60	105 474,68	114 503,16	120 478,95	124 187,91
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	30,06	30,00	31,52	31,79	31,81
Struktur PMTB ¹⁰					
a. Bangunan (Miliar Rp)	82 611,90	92 617,30	108 039,83	122 435,37	136 074,59
(%)	82,99	81,88	82,17	81,90	81,67
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	16 927,70	20 492,81	23 450,74	27 052,11	30 538,39
(%)	17,01	18,12	17,83	18,10	18,33
Total PMTB (Miliar Rp)	99 539,60	113 110,11	131 490,57	149 487,47	166 612,99
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹¹ (%)					
a. Bangunan	4,48	3,47	8,26	6,18	3,48
b. Non Bangunan	1,10	18,12	9,84	1,19	1,31
Total PMTB	3,89	5,96	8,56	5,22	3,08

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama tahun 2010-2014, seperti yang disajikan dalam tabel 3,13. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing komponen PMTB. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2010 sebesar 4,48 persen. Keadaan ini mengalami pertumbuhan melambat sebesar 3,47 persen pada tahun 2011, meskipun pada tahun 2012 kembali pulih hingga mencapai pertumbuhan sebesar 8,26 persen. Pada tahun 2013, sub komponen bangunan mengalami perlambatan kembali menjadi 6,18 persen hingga tahun 2014 sebesar 3,48 persen.

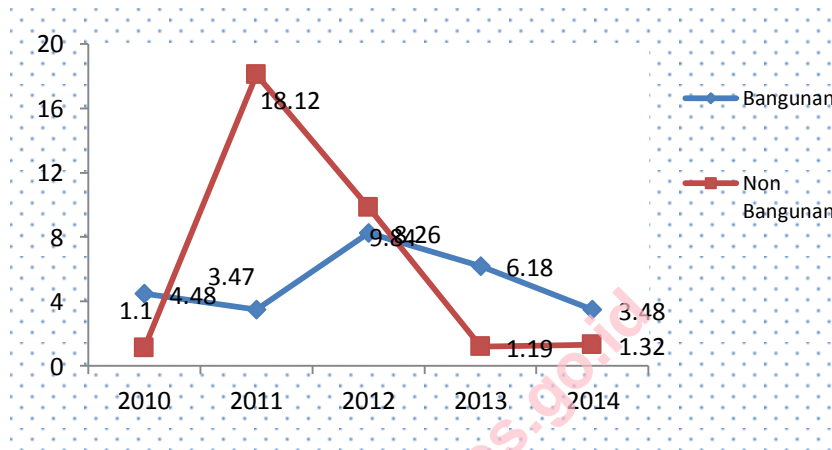
Berbeda dengan sub komponen bangunan, pertumbuhan sub komponen non bangunan tertinggi terjadi pada hingga tahun 2011 yakni sebesar 18,12 persen. Tahun 2010 non bangunan juga tumbuh relatif tinggi, yaitu sebesar 9,84

¹⁰Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

persen. Sedangkan tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami perlambatan pertumbuhan, masing-masing tumbuh sebesar 1,19 persen dan 1,31 persen. Seperti yang terlihat di gambar 3.2.

**Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB,
Sumatera Utara, 2010 - 2014**



3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi.

Tabel 3.14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Sumatera Utara, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	12 292,13	4 026,24	7 219,29	7 132,87	5 829,92
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	12 292,13	4 763,22	7 095,22	6 477,27	9 765,86
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3,71	1,07	1,73	1,52	1,11

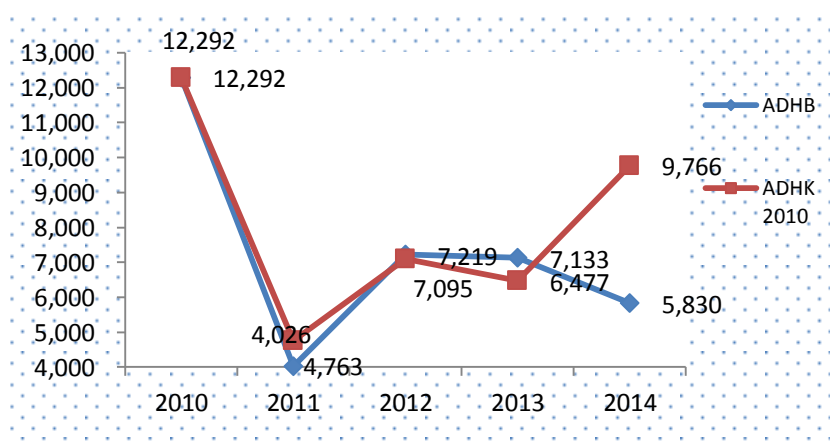
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2010 perubahan inventori sebesar 12.292,13 miliar rupiah atau menyumbang sebesar 3,71 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan tahun 2011 proporsinya turun menjadi 1,07 persen atau sebesar 4.026,24 miliar rupiah. Pada tahun 2012 sedikit mengalami peningkatan menjadi 1,73 persen terhadap total PDRB Provinsi Sumatera Utara. Hingga tahun 2014 perubahan inventori mampu menyumbang sebesar 1,11 persen atau sebesar 5,829,22 miliar rupiah.

Pada Grafik 3.3 menggambarkan perubahan inventori ADHB dan ADHK 2010 pada tahun 2010 hingga tahun 2014.

Grafik 3.3. Perbandingan Perubahan Inventori ADHB dan ADHK 2010, Sumatera Utara, 2010 - 2014



3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 3.15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Sumatera Utara, 2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	133 920,44	161 949,43	168 825,71	179 651,08	188 901,78
b. ADHK (Miliar Rp)	133 920,44	168 211,09	188 447,53	179 430,98	186 415,92
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	40,45	42,95	40,47	38,21	36,07
Struktur Ekspor ¹²					
a. Barang (Miliar Rp)	130 970,77	158 418,65	164 702,63	174 882,03	183 280,26
(%)	97,80	97,84	97,56	97,35	97,02
b. Jasa (Miliar Rp)	2 949,67	3 500,78	4 123,08	4 769,05	5 621,53
(%)	2,20	2,16	2,44	2,65	2,98
Total Ekspor (%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹³					
- Barang	1,01	25,87	12,03	(4,98)	3,81
- Jasa	(0,44)	14,07	11,92	4,74	7,45
- Total Ekspor	0,98	25,61	12,03	(4,78)	3,89

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara total, nilai ekspor tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 nilai ekspor Provinsi Sumatera Utara mencapai 133.920,44 miliar rupiah meningkat hingga menjadi 188.901,78 miliar rupiah pada tahun 2014. Meskipun secara nominal nilai ekspor mengalami peningkatan, tetapi

¹²Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

proporsinya dalam PDRB cenderung menurun. Tahun 2010, proporsinya terhadap PDRB sebesar 40,45 persen mengalami penurunan ditahun 2014 menjadi 36,07 persen.

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Provinsi Sumatera Utara berupa barang (rata-rata 97 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang sangat tinggi, pada tahun 2011 mencapai 25,61 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang dan jasa. Sementara itu pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2013 (minus 4,78 persen) dari tahun 2012 yang tumbuh sebesar 12,03 persen. Perlambatan tersebut disebabkan oleh gejolak harga beberapa komoditas ekspor di pasar internasional yang menurun tajam terutama untuk CPO dan karet yang merupakan komoditas ekspor unggulan Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan minus tersebut didorong dengan pertumbuhan ekspor barang pada tahun 2013 yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu minus 4,98 persen, sementara ekspor jasa 4,74 persen. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya penurunan nilai ekspor barang pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2014 ekspor hanya tumbuh sebesar 3,89 persen.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Provinsi Sumatera Utara di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa),

Tabel 3.16, Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Sumatera Utara, 2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a, ADHB (Miliar Rp)	122 546,50	133 789,52	150 808,25	161 937,13	170 460,92
b, ADHK (Miliar Rp)	122 546,50	142 386,54	161 698,66	146 354,29	151 447,58
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	37,01	35,48	36,15	34,44	32,54
Struktur Impor ¹⁴					
a. Barang (Miliar Rp)	116 225,75	127 492,87	143 625,90	153 012,92	160 186,24
(%)	94,84	95,29	95,24	94,49	93,97
b. Jasa (Miliar Rp)	6 320,75	6 296,65	7 182,35	8 924,21	10 274,69
(%)	5,16	4,71	4,76	5,51	6,03
Total Impor (%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹⁵					
- Barang	1,28	17,06	14,00	(10,29)	3,65
- Jasa	18,17	0,16	4,14	9,30	0,25
- Total Impor	2,03	16,19	13,56	(9,49)	3,48

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.16 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2010 s.d 2014 cenderung meningkat (baik ADHB maupun ADHK 2010). Namun pada tahun 2013 nilai impor ADHK 2010 mengalami penurunan dimana nilainya mencapai 146.354,29 miliar rupiah dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 161.698,66 miliar rupiah. Meskipun secara nominal nilai impor mengalami peningkatan, tetapi proporsinya terhadap PDRB cenderung menurun. Pada tahun 2010, proporsinya terhadap PDRB sebesar 37,01 persen mengalami penurunan ditahun 2014 menjadi 32,54 persen.

Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 2,03 persen hingga tahun 2014 menjadi sebesar 3,48 persen. Perlambatan terjadi di tahun 2013 dengan pertumbuhan minus 9,49 persen. Pertumbuhan minus tersebut didorong dengan pertumbuhan impor

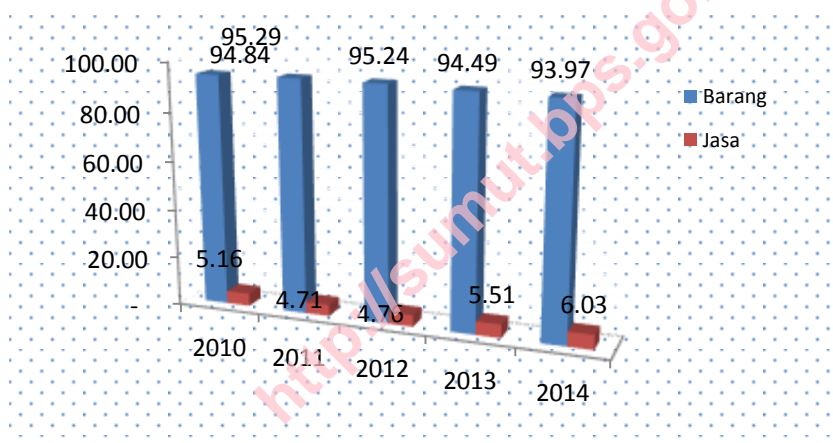
¹⁴Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

barang pada tahun 2013 yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu minus 10,29 persen.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi rata-rata sekitar 94 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. Peranan impor barang pada tahun 2014 menjadi sebesar 93,97 persen menurun dibandingkan dengan peranan tahun 2010 sebesar 94,84 persen. Demikian juga impor jasa, pada tahun 2014 mempunyai peranan terhadap pembentukan nilai impor sebesar 6,03 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 5,16 persen. Seperti yang digambarkan dalam gambar 3.4.

Grafik 3.4. Perkembangan Impor Barang dan Jasa ADHB, Sumatera Utara, 2010 - 2014



3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB

MENURUT PENGELUARAN

SUMATERA UTARA

2010 - 2014

<http://sumut.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB per-kapita Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada tabel 4.1, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sumatera Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

**Tabel 4.1. PDRB dan PDRB Perkapita
Sumatera Utara, 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	331 085,24	377 037,10	417 120,44	470 221,98	523 771,57
- ADHK 2010	331 085,24	353 147,59	375 924,14	398 779,25	419 649,28
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	25 412,07	28 518,19	31 109,35	34 599,95	38 045,85
- ADHK 2010	25 412,07	26 711,24	28 036,88	29 343,04	30 482,59
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	-	5,11	4,96	4,66	3,88
Jumlah Penduduk (000 org)	13 029	13 221	13 408	13 590	13 767
Pertumbuhan	-	1,48	1,42	1,36	1,30

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan PDRB per-kapita secara “riil” melambat selama kurun waktu 2010-2014. Tahun 2014, pdrb perkapita hanya mampu tumbuh sebesar 3,88 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang melambat. Tahun 2014, pertumbuhan penduduk sebesar 1,30 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 1,36 persen.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam pengeluaran PDRB Sumatera Utara (sekitar 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Sumatera Utara sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Sumatera Utara Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	178 332,31	198 151,44	222 744,92	254 148,64	286 960,38
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	133 920,44	161 949,43	168 825,71	179 651,08	188 901,78
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,33	1,22	1,32	1,41	1,52

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 1,33 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai rasio relatif sama yaitu dalam rentang 0,73-0,79. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio PDRB terhadap Impor merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar pengeluaran produk yang tersedia di wilayah domestik Sumatera Utara digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Sumatera Utara, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	178 332,31	198 151,44	222 744,92	254 148,64	286 960,38
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	99 539,60	113 110,11	131 490,57	149 487,47	166 612,99
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,79	1,75	1,69	1,70	1,72

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB berfluktuatif, periode 2010 sampai 2012 cenderung menurun, dari sebesar 1,79 pada tahun 2010 menjadi 1,75 pada tahun 2011 dan menjadi 1,69 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 rasionya mengalami peningkatan menjadi 1,70 dan menjadi 1,72 pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena berfluktuasinya nilai investasi, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah pengeluaran berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Sumatera Utara, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	178 332,31	198 151,44	222 744,92	254 148,64	286 960,38
b. LNPRT	3 839,64	4 020,89	4 261,58	4 675,82	5 128,86
c. Pemerintah	25 707,62	29 568,52	33 386,62	37 063,22	40 798,56
Jumlah	207 879,58	231 740,85	260 393,12	295 887,68	332 887,80
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	331 085,24	377 037,10	417 120,44	470 221,98	523 771,57
Proporsi	62,79	38,07	38,43	38,62	38,86

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2010 sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 62 persen). Berbeda dengan tahun berikutnya, proporsinya menjadi sekitar 38 persen, meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang besar.

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, proporsi terbesar terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 62,79 persen. Sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 38,07 persen.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB ADHB Sumatera Utara, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	133 920,44	161 949,43	168 825,71	179 651,08	188 901,78
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	99 539,60	113 110,11	131 490,57	149 487,47	166 612,99
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,35	1,43	1,28	1,20	1,13

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada periode 2010-2014, secara umum ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB. Rasio yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,35, sementara terendah tahun 2014 sebesar 1,13. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio PDRB terhadap Impor memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 4.6. Rasio PDRB terhadap Impor Sumatera Utara, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	331 085,24	377 037,10	417 120,44	470 221,98	523 771,57
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	122 546,50	133 789,52	150 808,25	161 937,13	170 460,92
Rasio PDRB terhadap Impor	2,70	4,55	4,49	4,73	5,03

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor kurun waktu 2010–2014 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Rasio paling rendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 2,70, sementara yang tertinggi sebesar 5,03 terjadi pada tahun 2014. Hal ini lebih disebabkan peningkatan PDRB yang relatif lebih cepat dibandingkan peningkatan nilai impor. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 4.7. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Sumatera Utara, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB)	331 085,24	377 037,10	417 120,44	470 221,98	523 771,57
(Miliar Rp)					
%	72,99	81,98	81,79	82,55	83,40
Total nilai Impor					
ADHB	122 546,50	133 789,52	150 808,25	161 937,13	170 460,92
(Miliar Rp)					
%	27,01	18,02	18,21	17,45	16,60
Total Permintaan					
<u>Akhir¹</u>	453 631,74	742 567,47	828 321,81	928 046,80	1 027 120,29
(Miliar Rp)					
%	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Dari tabel 4.7, terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan daerah lain, dengan rentang 16,60 s.d 27,01 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 453.631,74 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar 1.027.120,29 miliar rupiah pada tahun 2014.

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik pada tahun 2010 sebesar 331.085,24 miliar rupiah; 337.037,10 miliar rupiah (2011); 417.120,44 miliar rupiah (2012); 470.221,98 miliar rupiah (2013); dan 523.771,57 miliar rupiah (2014). Karena produk domestik tidak

¹ Termasuk diskrepansi statistik

mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 122.546,50 miliar rupiah (2010); 133.789,52 miliar rupiah (2011); 417.120,44 miliar rupiah (2012); 470.221,98 miliar rupiah (2013); dan 523.771,57 miliar rupiah (2014).

<http://sumut.bps.go.id>

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) serta dari daerah lain dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 4.8. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Sumatera Utara 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	133 920,44	161 949,43	168 825,71	179 651,08	188 901,78
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	122 546,50	133 789,52	150 808,25	161 937,13	170 460,92
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	11 373,94	28 159,91	18 017,46	17 713,96	18 440,86
Rasio ekspor thdp Impor	1,09	1,21	1,12	1,11	1,11

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama periode 2010-2014 posisi perdagangan barang dan jasa Sumatera Utara dengan luar negeri dan antar pulau, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Sumatera Utara selalu

dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**tabungan**”. Surplus perdagangan Sumatera Utara yang terjadi antara tahun 2010 sampai dengan 2014 tercatat masing-masing sebesar 11.373,94 miliar rupiah (2010), 28.159,91 miliar rupiah (2011), 18.017,46 miliar rupiah (2012), 17.713,96 miliar rupiah (2013) dan 18.440,86 miliar rupiah (2014).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 1,09 menjadi sekitar 1,11 pada tahun 2014.

<http://sumut.bps.go.id>

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio Perdagangan Internasional (RPI) menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d +1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

**Tabel 4.9. Rasio Perdagangan Internasional,
Sumatera Utara, 2010 - 2014**

Uraian	Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	84 078,83	105 759,18	101 907,67	105 269,29	115 200,19
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	40 298,49	50 735,29	56 272,69	63 840,80	68 333,89
(X - M) (Miliar Rp)	43 780,35	55 023,89	45 634,98	41 428,49	46 866,29
(X +M) (Miliar Rp)	124 377,32	156 494,48	158 180,36	169 110,09	183 534,08
R P I	0,35	0,35	0,29	0,24	0,26

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2010-2014, posisi ekspor LN selalu lebih tinggi dari impor LN. Kecenderungan nilai ekspor LN pada periode tersebut terus meningkat dari 84.078,83 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 115.200,19 miliar rupiah pada tahun 2014. Begitu pula dengan kecenderungan impor LN, yang mempunyai pola hampir sama dengan ekspor LN, cenderung meningkat setiap tahun.

Rasio Perdagangan Internasional Sumatera Utara pada periode 2010-2014 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, meskipun dengan rasio yang cukup kecil antara 0,24 hingga 0,35.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 4.10. Incremental Capital Output Ratio,
Sumatera Utara, 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	331,085.24	353,147.59	375,924.14	398,779.25	419,649.28
Perubahan (miliar rupiah)	19,863.78	22,062.35	22,776.55	22,855.11	20,870.03
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	99,539.60	105,474.68	114,503.16	120,478.95	124,187.91
ICOR	5.01	4.78	5.03	5.27	5.95

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 4.10 menunjukkan besaran ICOR Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 5,01, tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4,78 persen. Namun sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, ICOR Sumatera Utara mengalami peningkatan, yaitu dari 5,03 hingga 5,95.

BAB V

PENUTUP

<http://sumut.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 s.d 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Sumatera Utara terhadap ekonomi negara dan daerah lain.

<http://sumut.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://sumut.bps.go.id>

Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010-2014

Juta Rupiah

No	Komponen Penggunaan	2010	2011	2012	2013 ^(*)	2014 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	178 332 312,83	198 151 435,05	222 744 922,75	254 148 642,84	286 960 384,00
	a. Makanan Minuman dan Rokok	77 069 174,15	83 691 421,62	92 143 643,01	104 128 251,40	116 442 775,60
	b. Pakaian dan Alas Kaki	7 864 513,00	8 564 030,35	9 130 870,58	10 724 004,82	12 419 780,66
	c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	25 044 060,62	28 019 504,46	31 193 435,82	36 018 796,71	41 943 111,99
	d. Kesehatan dan Pendidikan	12 531 163,99	13 943 389,12	15 684 847,52	17 727 668,04	20 223 682,01
	e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	36 408 772,45	41 586 317,86	48 688 202,85	55 938 323,46	61 763 598,54
	f. Hotel dan Restoran	13 973 187,80	15 953 441,08	18 924 609,23	21 585 244,25	24 815 747,58
	g. Lainnya	5 441 440,82	6 393 330,57	6 979 313,74	8 026 354,16	9 351 687,62
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3 839 643,16	4 020 890,55	4 261 576,86	4 675 824,11	5 128 855,81
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25 707 619,69	29 568 520,01	33 386 620,71	37 063 215,11	40 798 560,90
	a. Konsumsi Kolektif	14 528 364,98	16 268 288,48	18 771 522,71	20 966 365,75	23 180 878,59
	b. Konsumsi Individu	11 179 254,71	13 300 231,53	14 615 098,00	16 096 849,36	17 617 682,31
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	99 539 596,99	113 110 109,03	131 490 567,53	149 487 471,72	166 612 987,36
	a. Bangunan	82 611 896,02	92 617 295,89	108 039 828,30	122 435 365,90	136 074 593,82
	b. Non-Bangunan	16 927 700,97	20 492 813,14	23 450 739,23	27 052 105,82	30 538 393,54
5	Perubahan Inventori	12 292 127,80	4 026 236,80	7 219 291,15	7 132 874,69	5 829 916,29
6	Ekspor	133 920 435,42	161 949 430,46	168 825 714,35	179 651 084,61	188 901 782,17
	a. Barang	130 970 770,20	158 448 646,71	164 702 631,80	174 882 031,51	183 280 256,96
	b. Jasa	2 949 665,22	3 500 783,76	4 123 082,55	4 769 053,09	5 621 525,21
7	Impor	122 546 498,42	133 789 520,87	150 808 254,68	161 937 129,50	170 460 920,99
	a. Barang	116 225 752,34	127 492 867,28	143 625 901,53	153 012 923,40	160 186 235,72
	b. Jasa	6 320 746,08	6 296 653,60	7 182 353,15	8 924 206,11	10 274 685,27
	PDRB	331 085 237,47	377 037 101,03	417 120 438,66	470 221 983,57	523 771 565,54

Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010-2014

Juta Rupiah

No	Komponen Penggunaan	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	178 332 312,83	186 197 958,82	195 133 161,54	204 962 973,31	215 885 143,13
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	77 069 174,15	79 038 417,56	82 289 954,58	86 203 395,33	90 810 544,48
b.	Pakaian dan Alas Kaki	7 864 513,00	8 204 621,35	8 684 411,72	9 152 888,03	9 613 657,18
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	25 044 060,62	26 133 461,06	27 441 476,65	28 617 720,35	29 948 249,67
d.	Kesehatan dan Pendidikan	12 531 163,99	13 416 911,22	14 128 745,11	14 801 274,72	15 575 670,67
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	36 408 772,45	38 971 644,27	40 957 247,16	43 126 421,35	45 497 561,61
f.	Hotel dan Restoran	13 973 187,80	14 426 072,05	15 362 549,38	16 508 657,60	17 563 790,79
g.	Lainnya	5 441 440,82	6 006 831,31	6 268 776,94	6 552 615,93	6 875 668,73
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3 839 643,16	3 987 869,18	4 125 828,02	4 329 796,06	4 533 947,87
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25 707 619,69	26 899 313,73	28 317 904,35	29 453 575,21	30 308 080,52
a.	Konsumsi Kolektif	14 528 364,98	15 063 737,16	16 064 005,84	16 771 025,24	17 324 067,63
b.	Konsumsi Individu	11 179 254,71	11 835 576,57	12 253 898,51	12 682 549,97	12 984 012,89
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	99 539 596,99	105 474 677,27	114 503 155,62	120 478 951,93	124 187 914,48
a.	Bangunan	82 611 896,02	85 479 889,28	92 540 043,44	98 254 543,12	101 672 559,90
b.	Non-Bangunan	16 927 700,97	19 994 787,99	21 963 112,18	22 224 408,81	22 515 354,58
5	Perubahan Inventori	12 292 127,80	4 763 219,70	7 095 220,20	6 477 267,97	9 765 855,24
6	Ekspor	133 920 435,42	168 211 092,12	188 447 525,03	179 430 979,35	186 415 916,16
a.	Barang	130 970 770,20	164 846 488,13	184 681 929,18	175 486 745,26	182 177 958,29
b.	Jasa	2 949 665,22	3 364 603,99	3 765 595,86	3 944 234,09	4 237 957,87
7	Impor	122 546 498,42	142 386 539,62	161 698 655,31	146 354 293,45	151 447 575,68
a.	Barang	116 225 752,34	136 055 540,68	155 105 282,48	139 147 675,89	144 222 591,09
b.	Jasa	6 320 746,08	6 330 998,93	6 593 372,83	7 206 617,56	7 224 984,60
PDRB		331 085 237,47	353 147 591,20	375 924 139,45	398 779 250,37	419 649 281,71

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010-2014

No	Komponen Penggunaan	2010	2011	2012	2013 ^(*)	2014 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53,86	52,55	53,40	54,05	54,79
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	23,28	22,20	22,09	22,14	22,23
b.	Pakaian dan Alas Kaki	2,38	2,27	2,19	2,28	2,37
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,56	7,43	7,48	7,66	8,01
d.	Kesehatan dan Pendidikan	3,78	3,70	3,76	3,77	3,86
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,00	11,03	11,67	11,90	11,79
f.	Hotel dan Restoran	4,22	4,23	4,54	4,59	4,74
g.	Lainnya	1,64	1,70	1,67	1,71	1,79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,16	1,07	1,02	0,99	0,98
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,76	7,84	8,00	7,88	7,79
a.	Konsumsi Kolektif	4,39	4,31	4,50	4,46	4,43
b.	Konsumsi Individu	3,38	3,53	3,50	3,42	3,36
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,06	30,00	31,52	31,79	31,81
a.	Bangunan	24,95	24,56	25,90	26,04	25,98
b.	Non-Bangunan	5,11	5,44	5,62	5,75	5,83
5	Perubahan Inventori	3,71	1,07	1,73	1,52	1,11
6	Ekspor	40,45	42,95	40,47	38,21	36,07
a.	Barang	39,56	42,02	39,49	37,19	34,99
b.	Jasa	0,89	0,93	0,99	1,01	1,07
7	Impor	37,01	35,48	36,15	34,44	32,54
a.	Barang	35,10	33,81	34,43	32,54	30,58
b.	Jasa	1,91	1,67	1,72	1,90	1,96
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010-2014

No (1)	Komponen Penggunaan (2)	2010 (3)	2011 (4)	2012 (5)	2013*) (6)	2014**) (7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53,86	52,73	51,91	51,40	51,44
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	23,28	22,38	21,89	21,62	21,64
	b. Pakaian dan Alas Kaki	2,38	2,32	2,31	2,30	2,29
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,56	7,40	7,30	7,18	7,14
	d. Kesehatan dan Pendidikan	3,78	3,80	3,76	3,71	3,71
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,00	11,04	10,90	10,81	10,84
	f. Hotel dan Restoran	4,22	4,08	4,09	4,14	4,19
	g. Lainnya	1,64	1,70	1,67	1,64	1,64
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,16	1,13	1,10	1,09	1,08
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,76	7,62	7,53	7,39	7,22
	a. Konsumsi Kolektif	4,39	4,27	4,27	4,21	4,13
	b. Konsumsi Individu	3,38	3,35	3,26	3,18	3,09
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,06	29,87	30,46	30,21	29,59
	a. Bangunan	24,95	24,21	24,62	24,64	24,23
	b. Non-Bangunan	5,11	5,66	5,84	5,57	5,37
5	Perubahan Inventori	3,71	1,35	1,89	1,62	2,33
6	Ekspor	40,45	47,63	50,13	45,00	44,42
	a. Barang	39,56	46,68	49,13	44,01	43,41
	b. Jasa	0,89	0,95	1,00	0,99	1,01
7	Impor	37,01	40,32	43,01	36,70	36,09
	a. Barang	35,10	38,53	41,26	34,89	34,37
	b. Jasa	1,91	1,79	1,75	1,81	1,72
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010-2014

No (1)	Komponen Penggunaan (2)	2011 (4)	2012 (5)	2013 ^{*)} (6)	2014 ^{**)} (7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11,11	12,41	14,10	12,91
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,59	10,10	13,01	11,83
	b. Pakaian dan Alas Kaki	8,89	6,62	17,45	15,81
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,88	11,33	15,47	16,45
	d. Kesehatan dan Pendidikan	11,27	12,49	13,02	14,08
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,22	17,08	14,89	10,41
	f. Hotel dan Restoran	14,17	18,62	14,06	14,97
	g. Lainnya	17,49	9,17	15,00	16,51
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,72	5,99	9,72	9,69
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,02	12,91	11,01	10,08
	a. Konsumsi Kolektif	11,98	15,39	11,69	10,56
	b. Konsumsi Individu	18,97	9,89	10,14	9,45
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,63	16,25	13,69	11,46
	a. Bangunan	12,11	16,65	13,32	11,14
	b. Non-Bangunan	21,06	14,43	15,36	12,89
5	Perubahan Inventori	(67,25)	79,31	(1,20)	(18,27)
6	Ekspor	20,93	4,25	6,41	5,15
	a. Barang	20,98	3,95	6,18	4,80
	b. Jasa	18,68	17,78	15,67	17,88
7	Impor	9,17	12,72	7,38	5,26
	a. Barang	9,69	12,65	6,54	4,69
	b. Jasa	(0,38)	14,07	24,25	15,13
	PDRB	13,88	10,63	12,73	11,39

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010-2014

No	Komponen Penggunaan	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,41	4,80	5,04	5,33
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,56	4,11	4,76	5,34
	b. Pakaian dan Alas Kaki	4,32	5,85	5,39	5,03
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,35	5,01	4,29	4,65
	d. Kesehatan dan Pendidikan	7,07	5,31	4,76	5,23
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,04	5,09	5,30	5,50
	f. Hotel dan Restoran	3,24	6,49	7,46	6,39
	g. Lainnya	10,39	4,36	4,53	4,93
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,86	3,46	4,94	4,72
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,64	5,27	4,01	2,90
	a. Konsumsi Kolektif	3,69	6,64	4,40	3,30
	b. Konsumsi Individu	5,87	3,53	3,50	2,38
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,96	8,56	5,22	3,08
	a. Bangunan	3,47	8,26	6,18	3,48
	b. Non-Bangunan	18,12	9,84	1,19	1,31
5	Perubahan Inventori	(61,25)	48,96	(8,71)	50,77
6	Ekspor	25,61	12,03	(4,78)	3,89
	a. Barang	25,87	12,03	(4,98)	3,81
	b. Jasa	14,07	11,92	4,74	7,45
7	Impor	16,19	13,56	(9,49)	3,48
	a. Barang	17,06	14,00	(10,29)	3,65
	b. Jasa	0,16	4,14	9,30	0,25
	PDRB	6,66	6,45	6,08	5,23

Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010-2014

No (1)	Komponen Penggunaan (2)	2010 (3)	2011 (4)	2012 (5)	2013*) (6)	2014**) (7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	100,00	111,11	124,90	142,51	160,91
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	108,59	119,56	135,11	151,09
b.	Pakaian dan Alas Kaki	100,00	108,89	116,10	136,36	157,92
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	111,88	124,55	143,82	167,48
d.	Kesehatan dan Pendidikan	100,00	111,27	125,17	141,47	161,39
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	114,22	133,73	153,64	169,64
f.	Hotel dan Restoran	100,00	114,17	135,44	154,48	177,60
g.	Lainnya	100,00	117,49	128,26	147,50	171,86
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	104,72	110,99	121,78	133,58
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	115,02	129,87	144,17	158,70
a.	Konsumsi Kolektif	100,00	111,98	129,21	144,31	159,56
b.	Konsumsi Individu	100,00	118,97	130,73	143,99	157,59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	113,63	132,10	150,18	167,38
a.	Bangunan	100,00	112,11	130,78	148,21	164,72
b.	Non-Bangunan	100,00	121,06	138,53	159,81	180,40
5	Perubahan Inventori	100,00	32,75	58,73	58,03	47,43
6	Ekspor	100,00	120,93	126,06	134,15	141,06
a.	Barang	100,00	120,98	125,76	133,53	139,94
b.	Jasa	100,00	118,68	139,78	161,68	190,58
7	Impor	100,00	109,17	123,06	132,14	139,10
a.	Barang	100,00	109,69	123,57	131,65	137,82
b.	Jasa	100,00	99,62	113,63	141,19	162,55
PDRB		100,00	113,88	125,99	142,02	158,20

Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010-2014

No (1)	Komponen Penggunaan (2)	2010 (3)	2011 (4)	2012 (5)	2013*) (6)	2014**) (7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	100,00	104,41	109,42	114,93	121,06
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	102,56	106,77	111,85	117,83
	b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	104,32	110,43	116,38	122,24
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	104,35	109,57	114,27	119,58
	d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	107,07	112,75	118,12	124,30
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	107,04	112,49	118,45	124,96
	f. Hotel dan Restoran	100,00	103,24	109,94	118,15	125,70
	g. Lainnya	100,00	110,39	115,20	120,42	126,36
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	103,86	107,45	112,77	118,08
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	104,64	110,15	114,57	117,90
	a. Konsumsi Kolektif	100,00	103,69	110,57	115,44	119,24
	b. Konsumsi Individu	100,00	105,87	109,61	113,45	116,14
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	105,96	115,03	121,04	124,76
	a. Bangunan	100,00	103,47	112,02	118,94	123,07
	b. Non-Bangunan	100,00	118,12	129,75	131,29	133,01
5	Perubahan Inventori	100,00	38,75	57,72	52,69	79,45
6	Ekspor	100,00	125,61	140,72	133,98	139,20
	a. Barang	100,00	125,87	141,01	133,99	139,10
	b. Jasa	100,00	114,07	127,66	133,72	143,68
7	Impor	100,00	116,19	131,95	119,43	123,58
	a. Barang	100,00	117,06	133,45	119,72	124,09
	b. Jasa	100,00	100,16	104,31	114,02	114,31
	PDRB	100,00	106,66	113,54	120,45	126,75

Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010-2014

No (1)	Komponen Penggunaan (2)	2010 (3)	2011 (4)	2012 (5)	2013*) (6)	2014**) (7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	100,00	106,42	114,15	124,00	132,92
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	105,89	111,97	120,79	128,23
	b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	104,38	105,14	117,17	129,19
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	107,22	113,67	125,86	140,05
	d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	103,92	111,01	119,77	129,84
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	106,71	118,88	129,71	135,75
	f. Hotel dan Restoran	100,00	110,59	123,19	130,75	141,29
	g. Lainnya	100,00	106,43	111,33	122,49	136,01
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	100,83	103,29	107,99	113,12
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	109,92	117,90	125,84	134,61
	a. Konsumsi Kolektif	100,00	108,00	116,85	125,02	133,81
	b. Konsumsi Individu	100,00	112,38	119,27	126,92	135,69
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	107,24	114,84	124,08	134,16
	a. Bangunan	100,00	108,35	116,75	124,61	133,84
	b. Non-Bangunan	100,00	102,49	106,77	121,72	135,63
5	Perubahan Inventori	100,00	84,53	101,75	110,12	59,70
6	Ekspor	100,00	96,28	89,59	100,12	101,33
	a. Barang	100,00	96,12	89,18	99,66	100,61
	b. Jasa	100,00	104,05	109,49	120,91	132,65
7	Impor	100,00	93,96	93,27	110,65	112,55
	a. Barang	100,00	93,71	92,60	109,96	111,07
	b. Jasa	100,00	99,46	108,93	123,83	142,21
	PDRB	100,00	106,76	110,96	117,92	124,81

Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) menurut Pengeluaran Sumatera Utara, 2010-2014

No	Komponen Penggunaan	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,42	7,26	8,63	7,20
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	5,89	5,75	7,88	6,15
b.	Pakaian dan Alas Kaki	4,38	0,73	11,44	10,26
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,22	6,02	10,72	11,27
d.	Kesehatan dan Pendidikan	3,92	6,82	7,89	8,41
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,71	11,40	9,11	4,66
f.	Hotel dan Restoran	10,59	11,39	6,14	8,06
g.	Lainnya	6,43	4,60	10,02	11,04
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,83	2,44	4,55	4,75
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,92	7,26	6,73	6,97
a.	Konsumsi Kolektif	8,00	8,20	6,98	7,03
b.	Konsumsi Individu	12,38	6,13	6,42	6,91
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,24	7,08	8,05	8,13
a.	Bangunan	8,35	7,75	6,73	7,40
b.	Non-Bangunan	2,49	4,18	14,00	11,43
5	Perubahan Inventori	(15,47)	20,37	8,23	(45,79)
6	Ekspor	(3,72)	(6,95)	11,76	1,21
a.	Barang	(3,88)	(7,22)	11,74	0,95
b.	Jasa	4,05	5,23	10,43	9,71
7	Impor	(6,04)	(0,74)	18,64	1,72
a.	Barang	(6,29)	(1,18)	18,75	1,00
b.	Jasa	(0,54)	9,53	13,68	14,84
	PDRB	6,76	3,93	6,27	5,85

DAFTAR PUSTAKA

<http://sumut.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, PDRB Menurut Penggunaan, berbagai seri, Medan.
2. _____, *Sumatera Dalam Angka*, berbagai seri, Medan.
3. Badan Pusat Statistik, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
4. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
6. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
11. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
12. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
13. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
14. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
15. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
16. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

17. *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
18. *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
19. , *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
20. , *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76, New York, 2000.
21. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
22. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Jalan Asrama No.179 Medan 20123
Telp (061) 8452343, Fax. (061) 8452773
Home Page : <http://sumut.bps.go.id>
Email : bps1200@bps.go.id

ISSN 2356-122X



9 772356 122002